



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PELAYANAN KESEHATAN JIWA DASAR DI POSYANDU JIWA

**Rahmi Yuningsih**

Analisis Legislatif Ahli Muda  
[rahmi.yuningsih@dpr.go.id](mailto:rahmi.yuningsih@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Kesehatan jiwa masih menjadi masalah krusial yang sering diabaikan. Generasi Z yang diprediksi akan mendominasi bonus demografi pada tahun 2045, justru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap masalah kesehatan jiwa. Di tengah masyarakat, penderita masalah kesehatan jiwa masih mendapatkan stigma negatif dan diskriminasi. Sementara itu, di daerah masalah kesehatan jiwa belum menjadi prioritas dalam pembangunan. Padahal dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan jiwa memiliki peran penting untuk membentuk SDM yang berkualitas, produktif, dan mampu berkontribusi pada komunitas. Kesehatan jiwa merupakan bagian dari kesehatan secara keseluruhan sehingga menjaga kesehatan jiwa sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

Secara umum, kondisi kesehatan jiwa di Indonesia masih memprihatinkan dan pelayanan kesehatan jiwa belum mencapai target nasional. Data Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa sekitar 2 persen penduduk usia 15 tahun ke atas, atau sebanyak 8,6 juta jiwa, mengalami masalah kesehatan jiwa. Angka prevalensi tertinggi terjadi pada kelompok usia 15–24 tahun, berjenis kelamin perempuan, tidak memiliki tingkat pendidikan atau belum pernah sekolah, tidak bekerja, tinggal di perkotaan, dan status ekonomi terbawah. Adapun tiga masalah kesehatan jiwa dengan prevalensi tertinggi yaitu depresi, kecemasan, dan skizofrenia. Selain itu, data Profil Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa hanya 16,4 persen penduduk usia di atas 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa. Meskipun angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (10,1 persen), persentase tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu 60 persen. Sementara itu, proporsi penyandang gangguan jiwa yang memperoleh pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan tahun 2023 mencapai 32,7 persen. Angka tersebut juga masih jauh dari target sebesar 60 persen.

Untuk membangun masyarakat dengan kesehatan jiwa yang baik, pemerintah termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu bekerja keras. Petugas kesehatan mengumpulkan puluhan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kantor Desa Penambangan, Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 12 Februari 2025. Adapun jumlah keseluruhan ODGJ di kecamatan tersebut sebanyak 153 orang. Mereka mengikuti kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) jiwa yang diselenggarakan oleh Puskesmas setempat. Beberapa kegiatan Posyandu Jiwa antara lain pendataan dan pemeriksaan fisik, seperti berat badan, tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan asam urat. Petugas juga melakukan komunikasi untuk mengetahui perkembangan kesehatan jiwa, mengidentifikasi gejala dan tanda yang dialami, mengevaluasi perlakuan keluarga dan masyarakat, serta mengetahui ketaatan minum obat. Keaktifan Posyandu Jiwa di Jawa Timur ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi dalam mengatasi masalah kesehatan jiwa. Keseriusan tersebut juga terlihat dalam program Jatim Zero Pasung. Sejak diluncurkan pada tahun 2014, program ini telah berhasil membebaskan 1.594 orang ODGJ dari pemasangan, sementara 253 orang lainnya masih belum dibebaskan.

Posyandu Jiwa merupakan jejaring Puskesmas dan didayagunakan sebagai lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dengan melibatkan kader kesehatan desa. Tujuan utama Posyandu Jiwa adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan jiwa dasar kepada masyarakat. Selain itu, secara tidak langsung, Posyandu Jiwa bertujuan agar penderita menjadi mandiri, keluarga dan lingkungan menjadi teredukasi, serta membantu masyarakat untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Posyandu Jiwa berfokus pada deteksi dini, pencegahan, dan penanganan masalah kesehatan jiwa dasar di tingkat desa/kelurahan. Jika diperlukan, tim Posyandu Jiwa akan merujuk penderita ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa melalui Puskesmas, termasuk Posyandu Jiwa, secara bertahap. Kemenkes menargetkan bahwa pada tahun 2025, 50 persen Puskesmas di Indonesia dapat menyediakan pelayanan kesehatan jiwa, dan pada tahun 2026, targetnya akan meningkat menjadi 70 persen. Saat ini, baru terdapat sekitar 40 persen Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa. Namun, persebarannya masih tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas, seperti psikolog klinis, masih terbatas, yaitu hanya 241 orang dan sebagian besar terkonsentrasi di Jakarta. Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan jumlah Puskesmas yang mencapai 10.180 unit di seluruh Indonesia.

## Atensi DPR

Komisi IX DPR RI perlu mendorong Kemenkes untuk meningkatkan jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Posyandu Jiwa, disertai dengan peningkatan jumlah dan sebaran sumber daya pendukungnya, seperti ketersediaan tenaga psikolog klinis di setiap Puskesmas. Komisi IX DPR RI perlu mendukung prioritas pengadaan tenaga psikolog klinis melalui peningkatan jumlah dan sebaran penyelenggara pendidikan profesi psikologi klinis di berbagai daerah. Selain itu, Komisi IX DPR RI perlu mendorong Kemenkes untuk meningkatkan sosialisasi pentingnya kesehatan jiwa sebagai bagian dari kesehatan secara keseluruhan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Sebagai bagian dari program pemeriksaan kesehatan gratis, skrining kesehatan jiwa perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Lebih jauh lagi, Komisi IX DPR RI perlu mendorong Kemenkes agar Posyandu Jiwa tidak hanya dilakukan di tengah masyarakat, melainkan juga dapat dilakukan di sekolah-sekolah sebagai upaya mendeteksi masalah kesehatan jiwa pada semua anak usia sekolah.

## Sumber

antaranews.com, 13 Desember 2024;  
jatimprov.go.id, 15 Januari 2025;  
kemenkes.go.id, 2024;

*Kompas*, 13 Februari 2025;  
lpkindonesia.or.id, 15 Februari 2025; dan  
rri.co.id, 11 Februari 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikhah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*